



Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus di Badan Usaha Milik Desa Bintang Baru, Desa Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya)

Rizky Adithya¹, Wida Arindya Sari², Henri Prasetyo^{3*}

¹²³Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak, Indonesia

*Email: henriprasetyo@polnep.ac.id

Doi : <https://doi.org/10.37339/e-bis.v6i1.881>

Diterbitkan oleh Politeknik Dharma Patria Kebumen

Info Artikel

Diterima :
2022-04-26

Diperbaiki :
2022-05-21

Disetujui :
2022-06-03

ABSTRAK

Dengan disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 maka desa telah menjadi daerah otonom dan berhak mengelola pendapatan desanya secara mandiri. Bintang Baru merupakan BUMDes di Kabupaten Kubu Raya yang hadir dari otonomi desa demi mewujudkan kesejahteraan warga. Kewajiban BUMDes sebagai badan hukum dalam menerapkan standar akuntansi, belum terlaksana hampir di seluruh daerah di Indonesia. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui penerapan SAK-ETAP dalam pengelolaan keuangan yang telah dilakukan BUMDes Bintang Baru. Penelitian ini dilaksanakan melalui survei dan dokumentasi menggunakan metode perbandingan tetap dengan menentukan kriteria dalam menentukan implementasi SAK-ETAP di BUMDes Bintang Baru. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BUMDes Bintang Baru masih belum menyusun laporan keuangannya sesuai dengan SAK-ETAP dan belum ada juknis yang mengatur tentang penatausahaan keuangan.

Kata Kunci: BUMDes, pengelolaan, keuangan

ABSTRACT

With the ratification of Law no. 6 of 2014, the village has become an autonomous region and has the right to manage its village income independently. Bintang Baru is a BUMDes in Kubu Raya Regency that comes from village autonomy to realize the welfare of the residents. The obligation of BUMDes as a legal entity in implementing accounting standards has not been implemented in almost all regions in Indonesia. The purpose of this study is to determine the application of SAK-ETAP in financial management carried out by BUMDes Bintang Baru. This research was conducted through surveys and documentation using a static comparison method by determining the criteria for determining the implementation of SAK-ETAP in BUMDes Bintang Baru. This study concludes that the BUMDes Bintang Baru still has not prepared its financial statements following SAK-ETAP, and there is no technical guideline that regulates financial administration.

Keywords: BUMDes, management, finance

1. PENDAHULUAN

Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara tidak langsung menjadikan desa bersifat otonom. Desa memiliki hak untuk mengelola sumber pendapatan desa, serta memperoleh dana bagi hasil dari pemerintah kabupaten/kota dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi serta perimbangan keuangan dari pemerintah pusat. Berubahnya status desa menjadi daerah yang otonom, maka pada suatu desa dapat dibentuk BUMDes untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat di sekitarnya. BUMDes merupakan suatu lembaga yang dibentuk atas inisiatif masyarakat desa yang memiliki asas mandiri.

BUMDes dalam menyusun laporan pertanggungjawaban perlu memperhatikan dengan Standar Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK-ETAP. Dalam penyajian laporan keuangan menggunakan SAK-ETAP, BUMDes menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan adanya SAK-ETAP, BUMDes dapat dengan mudah menyajikan laporan keuangan secara sederhana, lengkap, dan mudah dipahami (Adilah & Rani, 2020).

Penerapan SAK-ETAP menjadi penting karena adanya perubahan status BUMDes menjadi suatu badan hukum melalui PP No. 11 tahun 2021. Akan tetapi, hal tersebut masih belum sejalan dengan realita di BUMDes sesuai penelitian Saputra et al. (2019) yang menyatakan bahwa BUMDes di Sukabumi masih belum menerapkan SAK-ETAP dalam penyajian laporan keuangannya. Hal yang juga didapatkan oleh Rozalia et al. (2021) melalui penelitiannya yang menunjukkan BUMDes di Bengkulu Utara masih belum menerapkan SAK-ETAP dalam menyampaikan laporan keuangannya. Begitu juga penelitian dari Lintong et al. (2020) menunjukkan BUMDes di Minahasa Selatan dalam menghasilkan laporan keuangannya masih belum sesuai dengan SAK-ETAP.

Salah satu BUMDes yang memperoleh dana dari pemerintah desa yakni BUMDes Bintang Baru yang dibentuk melalui Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019. BUMDes Bintang Baru sebagai BUMDes yang masih baru, diharapkan dapat mengelola keuangan agar dapat menampilkan progres usaha yang telah dijalankan. Pengelolaan keuangan menggunakan PSAK dapat memberi dampak positif bagi badan usaha. Jati (2019) menjelaskan bahwa penerapan standar keuangan dapat menghasilkan informasi yang berkualitas. Dampak positif lain dijelaskan dari penelitian Seriwati & Hendi (2018) yang menunjukkan bahwa PSAK dapat menjadi kunci penting dalam menghasilkan laba bagi badan usaha. Bahkan, Yuliana et al. (2018) menjelaskan bahwa pencatatan yang sesuai standar keuangan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap badan usaha tersebut.

Penelitian Saputra et al. (2019), Rozalia et al. (2021), dan Lintong et al. (2020) mengungkapkan penerapan SAK-ETAP dengan meninjau laporan keuangan yang disusun oleh BUMDes. Peninjauan laporan keuangan sebagai dasar dalam menentukan suatu organisasi telah menjalankan standar akuntansi keuangan, belum dapat mencerminkan suatu organisasi menerapkan standar akuntansi keuangan secara menyeluruh. SAK-ETAP menyebutkan berbagai pernyataan yang perlu diterapkan sebagai dasar dalam menyusun laporan keuangan. Seharusnya konsep tersebut digunakan untuk menentukan organisasi tersebut menerapkan SAK-ETAP atau tidak. Bukan hanya dari tersedianya komponen laporan keuangan dan kesesuaian dengan format yang ada pada SAK-ETAP, akan tetapi dengan melihat prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menghasilkan laporan keuangan tersebut, apakah sudah sesuai dengan SAK-ETAP atau belum?

Hal inilah yang menjadi kesenjangan penelitian yang ingin dibahas dalam penelitian ini.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pemerintah Desa

Desa ialah kesatuan warga hukum yang mempunyai batasan area yang berhak untuk menata serta mengurus di bidang pemerintahan, kebutuhan warga setempat sesuai prakarsa warga, hak asal gagasan, dan/ataupun hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah desa ialah kepala desa selaku penyelenggara di bidang pemerintahan serta kebutuhan warga di desa yang diatur dengan sistem pemerintahan negara (Undang-Undang No. 6, 2016).

2.2 Badan Usaha Milik Desa

BUMDes merupakan lembaga hukum yang dibuat oleh desa serta/ataupun desa-desa untuk mengatur usaha, mendayagunakan fasilitas desa, meningkatkan penanaman modal serta daya produksi, menghadirkan pelayanan jasa, serta/ataupun menghadirkan usaha yang lain secara maksimal demi kesejahteraan warga desa. BUMDes bertujuan melaksanakan aktivitas ekonomi serta jasa umum, menaikkan pendapatan asli desa (PADes), pendayagunaan fasilitas desa, dan meningkatkan ekosistem ekonomi digital di desa (Peraturan Pemerintah No. 11, 2021).

2.3 Standar Akuntansi Keuangan

SAK ialah opini dan pemahaman yang dikeluarkan oleh Dewan SAK Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI (DSAS-IAI) dan juga regulasi pasar modal terhadap entitas di bawah pengawasannya. Pengembangan SAK di Indonesia berawal dari tahun 1973 melalui Panitia Penghimpun Bahan-Bahan dan Struktur *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) dan *Generally Accepted Auditing Standards* (GAAS). Mendekati aktifnya pasar modal di Indonesia pada tahun 1974, menjadi tantangan dan peluang bagi IAI dalam mengembangkan peran akuntan di dalam industri. Berdasarkan hal tersebut, IAI membentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (Komite PAI) dan melaksanakan kodifikasi prinsip akuntansi di Indonesia dalam suatu buku “Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI)” yang merujuk dari US GAAP (web.iaiglobal.or.id, 2022).

2.4 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

SAK untuk ETAP bertujuan untuk diterapkan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta menghasilkan laporan keuangan bertujuan umum bagi pengguna luar. Pengguna luar yang dimaksud ialah pemilik yang tidak berhubungan secara langsung dalam mengelola usaha, kreditur dan lembaga keuangan lainnya (web.iaiglobal.or.id, 2011).

SAK-ETAP berguna untuk menghadirkan keluwesan dalam pengelolaan keuangan dan kemudahan akses ETAP terhadap pengajuan dana dari lembaga perbankan. SAK-ETAP merupakan standar yang mandiri dan tidak merujuk pada SAK Umum, dominan menerapkan pemahaman biaya historis; mengelola transaksi yang dilaksanakan ETAP; bagian dari pengelolaan yang lebih sederhana mengenai perlakuan akuntansi serta bersifat tidak mudah berubah dalam jangka panjang (web.iaiglobal.or.id, 2011).

2.5 Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Dalam penerapan Standar Akuntansi Keuangan terhadap suatu organisasi dilakukan dengan melihat 4 (empat) aspek (Riyadhi et al., 2021), yaitu

- a. Pengakuan dan Pengukuran
Pengakuan ialah proses mengakui transaksi yang dapat dicatat dalam laporan keuangan. Dan untuk pengukuran ialah proses penetapan nilai nominal mata uang terhadap sebuah transaksi yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Sehingga pengakuan dan pengukuran merupakan proses mengakui transaksi beserta penetapan nominal mata uang untuk dicatat di dalam laporan keuangan.
- b. Penyajian
Penyajian merupakan proses menyajikan proses transaksi ke dalam pos-pos yang berada di laporan keuangan.
- c. Pengungkapan
Pengungkapan merupakan proses mengungkapkan informasi yang ditampilkan di laporan keuangan.
- d. Komponen Laporan Keuangan
Komponen laporan keuangan yang terdiri dari: laporan posisi keuangan/neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan melalui survei pada kantor BUMDes Bintang Baru, beralamat di Perumahan Pondok Indah Lestari, Jalur Dahlia I, Desa Parit Baru, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya. Sumber data pada penelitian ini yakni berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini berupa laporan keuangan yang didapatkan secara langsung dari subjek penelitian. Kemudian, data sekunder yang digunakan berasal dari hasil dokumentasi, buku, *website* (situs), jurnal, hasil penelitian, dan dokumen yang dapat mendukung penelitian.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode perbandingan tetap. Metode tersebut merupakan metode yang membandingkan satu informasi dengan informasi lainnya. Penggunaan metode ini dapat mempermudah menganalisa suatu kasus dan mengambil kesimpulan dari jawaban permasalahan yang akan dijelaskan melalui data laporan yang diperoleh dengan membandingkan peraturan perundang-undangan. BUMDes ini merupakan salah satu Bumdes yang memiliki banyak kegiatan usaha dan berada di pusat kota di Kabupaten Kubu Raya. Beberapa pimpinan dan pengurus BUMDes akan menjadi data primer dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis fokus meneliti permasalahan yakni implementasi SAK-ETAP dalam menghasilkan laporan keuangan di BUMDes Bintang Baru.

Dalam penentuan dari penerapan SAK-ETAP di BUMDes Bintang Baru dilakukan dengan menyusun kriteria berdasarkan aturan di SAK-ETAP. Kemudian dari kriteria tersebut dibandingkan dengan kondisi di BUMDes. Apabila kriteria tersebut terpenuhi atau BUMDes tersebut tidak mendapati transaksi yang dijelaskan di kriteria, maka BUMDes tersebut dianggap menerapkan SAK-ETAP dalam menghasilkan laporan keuangannya. Sedangkan jika BUMDes di dalam kriteria tidak terpenuhi, maka BUMDes tersebut dinyatakan tidak menerapkan SAK-ETAP dalam pelaporan keuangannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan SAK-ETAP pada BUMDes Bintang Baru dijelaskan sebagai berikut.

4.1 Pengakuan dan Pengukuran

Penerapan SAK-ETAP pada aspek pengakuan dan pengukuran dijelaskan melalui tabel berikut.

Tabel 1. Penerapan SAK-ETAP pada Aspek Pengakuan Dan Pengukuran

No.	Kriteria	Kesimpulan dari kondisi BUMDes
1	Mengakui transaksi yang terdapat/berkemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang diterima/akan diterima BUMDes (berbasis akrual).	BUMDes Bintang Baru mengakui transaksi berbasis akrual yang berasal dari piutang jasa internet. Sedangkan untuk transaksi pengeluaran dan penerimaan yang mempunyai manfaat ekonomis masih belum ada transaksi berbasis akrual. Sehingga dari dasar tersebut, maka pada poin ini BUMDes sesuai dengan SAK-ETAP .
2	Mengakui transaksi yang memiliki nilai atau biaya yang mampu diukur dengan andal.	BUMDes Bintang Baru belum mengakui transaksi penyusutan terhadap aset tetapnya. Dan untuk piutang yang masih belum dibayar, tidak dilakukan penghapusan/penyisihan piutang. Sehingga dari dasar tersebut, maka pada poin ini BUMDes tidak sesuai dengan SAK-ETAP .
3	Transaksi kas atau setara kas diukur menggunakan biaya historis (nilai saat diperoleh).	BUMDes Bintang Baru mengukur semua transaksi kas atau setara kas dengan menggunakan biaya historis dengan menggunakan mata uang rupiah. Sehingga dari dasar tersebut, maka pada poin ini BUMDes sesuai dengan SAK-ETAP .
4	Transaksi non kas diukur menggunakan biaya wajar (nilai pasar)	BUMDes Bintang Baru tidak terdapat transaksi yang berupa non kas. Sehingga dari dasar tersebut, maka pada poin ini BUMDes sesuai dengan SAK-ETAP .

Dalam penerapan SAK-ETAP pada BUMDes Bintang Baru melalui aspek pengakuan dan pengukuran menunjukkan bahwa BUMDes tersebut **tidak menerapkan SAK-ETAP** dalam pengakuan dan pengukuran keuangannya. Hal tersebut didasari dari kriteria ketiga dari aspek pengakuan dan pengukuran yang tidak memenuhi dari kriteria SAK-ETAP. Hasil penerapan SAK-ETAP dari aspek pengakuan dan pengukuran selaras dengan penelitian Pramitari et al. (2020) dan Saputra (2022) yang menunjukkan bahwa BUMDes masih belum mengimplementasi SAK-ETAP dalam pengakuan dan pengukuran transaksi keuangannya.

4.2 Penyajian

Penerapan SAK-ETAP pada aspek penyajian dijelaskan melalui tabel berikut.

Tabel 2. Penerapan SAK-ETAP pada Aspek Penyajian

No.	Kriteria	Kesimpulan dari kondisi BUMDes
1	Menyajikan pos-pos yang sesuai prinsip pengakuan dan pengukuran di laporan posisi keuangan/neraca, laba rugi, dan arus kas.	BUMDes Bintang baru menyajikan pos-pos yang kurang sesuai di Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi. Hal tersebut diakibatkan karena salah saji nilai dan pangakuan pos dalam penjurnalan. Sehingga dari dasar tersebut, maka pada poin ini BUMDes tidak sesuai dengan SAK-ETAP .

Dalam penerapan SAK-ETAP pada BUMDes Bintang Baru melalui aspek penyajian menunjukkan bahwa BUMDes tersebut **tidak menerapkan SAK-ETAP** dalam penyajian

laporan keuangannya. Pernyataan tersebut didasari dari kriteria dari aspek penyajian yang tidak memenuhi dari kriteria SAK-ETAP. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai tidak terpenuhinya kriteria dari aspek penyajian.

Berdasarkan data yang diperoleh pada penelitian ini yakni BUMDes Bintang Baru dalam pelaporan keuangan hanya menyusun laporan laba rugi dan neraca pada tahun 2019. Berdasarkan SAK-ETAP, laporan keuangan yang dibuat oleh entitas yakni laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Dalam pencatatan jurnal masih terdapat kekeliruan dalam penjurnalan atas transaksi penyertaan modal yang diberikan dari pemerintah desa ke BUMDes Bintang Baru dengan bukti transfer uang masuk ke kas BUMDes dan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa Parit Baru ke BUMDes Bintang Baru. Atas dasar tersebut, BUMDes Bintang Baru membuat pencatatan jurnal yakni:

Tabel 3. Jurnal yang dicatat oleh BUMDes Bintang Baru pada transaksi penyertaan modal

Tanggal	Rekening	Debet	Kredit
21-06-2019	Kas	75.000.000,00	
	Pendapatan		75.000.000,00

Jurnal yang seharusnya dicatat oleh BUMDes Bintang Baru terkait transaksi penyertaan modal.

Tabel 4. Jurnal yang seharusnya dicatat pada transaksi penyertaan modal

Tanggal	Rekening	Debet	Kredit
21-06-2019	Kas	75.000.000,00	
	Ekuitas		75.000.000,00

Jurnal yang dicatat oleh BUMDes Bintang Baru terkait transaksi belanja Unit Market BUMDes.

Tabel 5. Jurnal yang dicatat oleh BUMDes Bintang Baru pada transaksi transaksi belanja Unit Market BUMDes

Tanggal	Rekening	Debet	Kredit
24-06-2019	Biaya Perlengkapan	5.957.700,00	
	Perlengkapan		5.957.700,00

Jurnal yang seharusnya dicatat oleh BUMDes Bintang Baru terkait transaksi belanja Unit Market BUMDes.

Tabel 6. Jurnal yang seharusnya dicatat pada transaksi transaksi belanja Unit Market BUMDes

Tanggal	Rekening	Debet	Kredit
24-06-2019	Perlengkapan	5.957.700,00	
	Kas		5.957.700,00

Jurnal yang dicatat oleh BUMDes Bintang Baru terkait belanja perlengkapan bagian sekretariat.

Tabel 7. Jurnal yang dicatat oleh BUMDes Bintang Baru pada belanja perlengkapan bagian sekretariat

Tanggal	Rekening	Debet	Kredit
15-07-2019	Biaya Perlengkapan	12.237.500,00	
	Kas		12.237.500,00

Jurnal yang seharusnya dicatat oleh BUMDes Bintang Baru terkait belanja perlengkapan bagian sekretariat.

Tabel 8. Jurnal yang seharusnya dicatat pada belanja perlengkapan bagian sekretariat

Tanggal	Rekening	Debet	Kredit
15-07-2019	Perlengkapan Kas	12.237.500,00	12.237.500,00

Jurnal yang dicatat oleh BUMDes Bintang Baru terkait belanja Unit Bank Sampah.

Tabel 9. Jurnal yang dicatat oleh BUMDes Bintang Baru terkait belanja Unit Bank Sampah

Tanggal	Rekening	Debet	Kredit
17-12-2019	Biaya Umum Kas	800.000,00	800.000,00

Jurnal yang seharusnya dicatat oleh BUMDes Bintang Baru terkait belanja Unit Bank Sampah.

Tabel 10. Jurnal yang seharusnya dicatat pada belanja Unit Bank Sampah

Tanggal	Rekening	Debet	Kredit
17-12-2019	Perlengkapan Kas	800.000,00	800.000,00

Jurnal yang dicatat oleh BUMDes Bintang Baru terkait perputaran belanja unit material dan bangunan.

Tabel 11. Jurnal yang dicatat oleh BUMDes Bintang Baru pada perputaran belanja unit material dan bangunan

Tanggal	Rekening	Debet	Kredit
17-12-2019	Biaya Umum Lain-Lain Kas	56.005.000,00	56.005.000,00

Adapun jurnal yang dilakukan pada kegiatan ini seharusnya tidak diakui sebagai jurnal melainkan ini merupakan sisa uang dari penyertaan modal (Rp 75.000.000) dikurangi dengan total seluruh belanja pembelian perlengkapan (Rp 5.957.500+Rp 12.237.500+Rp 800.000 =Rp 18.995.000) maka diperoleh Rp 56.005.000. Dari sisa uang tersebut selanjutnya dilakukan perputaran uang untuk usaha.

Tabel 12. Jurnal yang seharusnya dicatat pada perputaran belanja unit material dan bangunan

Tanggal	Rekening	Debet	Kredit
17-12-2019	Kas Penjualan Barang	28.203.100,00	28.203.100,00

Berdasarkan hasil analisis dari bukti transaksi penjualan. Nilai penjualan yang diterima oleh BUMDes Bintang Baru yakni Rp 200.700.100. Maka dari itu jurnal yang seharusnya dilakukan oleh BUMDes Bintang Baru atas total penjualan sebagai berikut.

Tabel 13. Jurnal yang seharusnya dicatat dari laba Unit Material dan Bangunan

Tanggal	Rekening	Debet	Kredit
25-12-2019	Kas Penjualan Barang	200.700.100,00	200.700.100,00

Selanjutnya berdasarkan data jurnal yang disusun oleh BUMDes Bintang Baru atas modal awal kembali dari jual/beli Unit Material dan Bangunan.

Tabel 14. Jurnal yang dicatat dari Jual/Beli Unit Material dan Bangunan

Tanggal	Rekening	Debet	Kredit
25-12-2019	Kas	56.005.000,00	

Pendapatan	56.005.000,00
------------	---------------

Nilai ini seharusnya tidak dicatat oleh BUMDes Bintang Baru. Berdasarkan hasil survei dari dokumen yang diperoleh bahwa jumlah dokumen pembelian barang yang dilakukan perputaran uang dari sisa uang kas yakni sebesar Rp 172.497.000. Maka dari itu jurnal yang disusun oleh BUMDes Bintang Baru atas transaksi pembelian barang untuk perputaran usaha sebagai berikut.

Tabel 15. Jurnal yang dicatat dari Jual/Beli Unit Material dan Bangunan

Tanggal	Rekening	Debet	Kredit
25-12-2019	Biaya Umum	172.497.000,00	
	Kas		172.497.000,00

Dari hasil penjurnalan tersebut maka diperoleh hasil laba yang dicatat dalam Laporan Laba Rugi oleh BUMDes Bintang Baru sebagai berikut.

LAPORAN LABA/RUGI	
BUMDes Bintang Baru	
Untuk Periode yang Berakhir Desember 2019	
PENDAPATAN	
Pendapatan	131.005.000
Penjualan Barang	28.203.100
TOTAL PENDAPATAN	159.208.100
BIAYA	
Biaya Perlengkapan	18.195.200
Biaya Makan dan Minum	800.000.
Biaya Umum Lain-Lain	56.005.000
TOTAL BIAYA	(75.000.200)
LABA RUGI BERSIH	84.208.100

Gambar 1. Laporan Laba Rugi yang dibuat BUMDes Bintang Baru

Dari hasil laba rugi yang disusun oleh BUMDes Bintang Baru terdapat kesalahan yang dalam pelaporan. Hal ini dapat dilihat dari pembagian laba keseluruhan/umum yakni hanya sebesar Rp 28.203.100. Adapun rincian pembagian laba usaha dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15. Pembagian Laba Usaha Keseluruhan/Umum

Pembagian Laba	%	28.203.100
PAD	10%	2.820.310
Pemupukan modal	5%	1.410.155
Dana sosial/pendidikan	20%	5.640.620
Pengurus	65%	18.332.015
Jumlah	100%	28.203.100

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui terdapat perbedaan antara jumlah laba rugi yang diperoleh dari laporan laba rugi dengan pembagian laba secara keseluruhan. Selain itu, BUMDes Bintang Baru tidak mengakui alokasi laba tersebut sebagai pengurang laba pada

laporan laba rugi di tahun 2019. Sehingga pada pelaporan laba rugi yang disusun oleh BUMDes Bintang Baru seharusnya tidak terdapat laba yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa penyajian laporan laba rugi tidak sesuai dengan SAK-ETAP. Salah satunya tidak sesuai dengan sub bab 6.5 yang menyatakan Entitas menyajikan di laporan laba rugi dan saldo laba pos-pos berikut sebagai tambahan atas informasi yang disyaratkan dalam Bab 5 Laporan Laba Rugi:

- a. Saldo laba pada awal periode pelaporan;
- b. Dividen yang diumumkan dan dibayarkan atau terutang selama periode;
- c. Penyajian kembali saldo laba setelah koreksi kesalahan periode lalu;
- d. Penyajian kembali saldo laba setelah perubahan kebijakan akuntansi; dan
- e. saldo laba pada akhir periode pelaporan.

Pada point c dapat disimpulkan bahwa alokasi laba seharusnya menjadi pengurang atas laba kotor yang dihasilkan. Akibat kesalahan dalam hasil laba pada laporan laba rugi berpengaruh terhadap laba rugi tahun berjalan pada laporan perubahan ekuitas serta penyajian dalam neraca. Adapun laporan laba rugi yang seharusnya dicatat berdasarkan jurnal yang seharusnya di susun oleh BUMDes Bintang Baru sebagai berikut.

LAPORAN LABA/RUGI	
BUMDes Bintang Baru	
Untuk Periode yang Berakhir Desember 2019	
PENDAPATAN	
Pendapatan	0
Penjualan Barang	200.700.100
TOTAL PENDAPATAN	200.700.100
BIAYA	
Biaya Perlengkapan	0
Biaya Makan dan Minum	0
Biaya Umum Lain-Lain	172.497.000
TOTAL BIAYA	(172.497.000)
LABA RUGI KOTOR	28.203.100
Pembagian Laba	
Kontribusi PADes (10%)	2.820.310
Pemupukan Modal (5%)	1.410.155

Gambar 2. Laporan Laba Rugi yang seharusnya dibuat

Dari hasil laporan laba rugi yang disusun oleh BUMDes Bintang Baru maka berdampak terhadap penyajian laporan perubahan ekuitas dan neraca BUMDes Bintang Baru yakni sebagai berikut.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BUMDes Bintang Baru
Per 31 Desember 2019

Uraian	Kekayaan Pemerintah Desa yang di Pisahkan	Akumulasi Laba (Rugi) di tahan	Laba Rugi Tahun berjalan	Jumlah Ekuitas
Saldo Per 1 Januari 2019				
Penambahan	75.000.000	0	0	75.000.000
Pengurangan				
Saldo Per 1 Januari 2019	75.000.000	0	0	75.000.000

Gambar 3. Laporan Perubahan Ekuitas yang dibuat BUMDes Bintang Baru

NERACA
BUMDes Bintang Baru
Per 31 Desember 2019

ASET		LIABILITAS	
Kas	90.165.600	Utang	0
Perlengkapan	(5.957.700)		
		EKUITAS	
		Penyertaan Modal	
		Laba/Rugi Bersih	84.208.100
TOTAL ASET	84.208.100	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	84.208.100

Gambar 4. Laporan Neraca yang dibuat BUMDes Bintang Baru

Adanya kesalahan dalam penyajian Laporan Laba Rugi maka penyajian neraca yang disusun oleh BUMDes Bintang Baru juga akan mengalami perubahan. Neraca yang seharusnya disusun oleh BUMDes Bintang Baru yakni sebagai berikut.

NERACA BUMDes Bintang Baru Per 31 Desember 2019			
ASET		LIABILITAS	
Kas	56.005.000	Utang	0
Perlengkapan	18.995.000		
		EKUITAS	
		Penyertaan Modal	75.000.000
		Laba/Rugi Bersih	0
TOTAL ASET	75.000.000	TOTAL LIABILITAS	75.000.000
		DAN EKUITAS	

Gambar 5. Laporan Neraca yang seharusnya dibuat

Berdasarkan neraca yang disusun maka selanjutnya dapat kita susun Laporan Arus Kas. Adapun Laporan Arus Kas yang disusun oleh BUMDes Bintang Baru sebagai berikut.

LAPORAN ARUS KAS BUMDes Bintang Baru Per 31 Desember 2019	
Uraian	Jumlah
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Laba rugi tahun berjalan	0
Penyihan Piutang	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0
Laba Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	0
Perubahan Modal Kerja	
(Kenaikan)/Penurunan Piutang	
(Kenaikan)/Penurunan Perlengkapan	(18.995.000)
(Kenaikan)/Penurunan Persediaan	
(Kenaikan)/Penurunan Hutang	
Perubahan Modal Kerja Bersih	(18.995.000)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	(18.995.000)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	
(Penambahan)/Penurunan Tanah	0
(Penambahan)/Penurunan Bangunan Gedung	0
(Penambahan)/Penurunan Kendaraan	0
(Penambahan)/Penurunan Inventaris/Perabotan Kantor	0
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	0

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	
Perubahan Kewajiban Jangka Panjang (Kenaikan)/Penurunan Pinjaman Pemerintah Desa	0
Laba Ditahan	0
Kenaikan/(Penurunan) Modal dan Cadangan	75.000.000
Koreksi Yang Mempengaruhi Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu	0
Kenaikan/(Penurunan) bersih kas dan setara kas	56.005.000
Kas dan Setara Kas pada Awal Periode	0
Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode	56.005.000

Gambar 6. Laporan Arus Kas yang dibuat BUMDes Bintang Baru

4.3 Pengungkapan

Penerapan SAK-ETAP pada aspek pengungkapan dijelaskan melalui tabel berikut.

Tabel 16. Penerapan SAK-ETAP pada Aspek Pengungkapan

No.	Kriteria	Kesimpulan dari kondisi BUMDes
1	Mengungkapkan informasi mengenai dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan (Metode atau kebijakan).	BUMDes Bintang baru tidak ada pengungkapan informasi yang mengenai penyajian laporan keuangan yang disusun. Sehingga dari dasar tersebut, maka pada poin ini BUMDes tidak sesuai dengan SAK-ETAP .
2	Mengungkapkan rincian aset dan kewajiban mengenai sifat dan jumlah yang dicatat di akhir periode.	BUMDes Bintang baru tidak ada pengungkapan informasi yang mengenai penyajian laporan keuangan yang disusun. Sehingga dari dasar tersebut, maka pada poin ini BUMDes tidak sesuai dengan SAK-ETAP .
3	Jika terdapat perubahan kebijakan yang mempengaruhi periode berjalan maka perlu diungkapkan perubahan tersebut.	BUMDes Bintang baru tidak ada pengungkapan informasi yang mengenai penyajian laporan keuangan yang disusun. Sehingga dari dasar tersebut, maka pada poin ini BUMDes tidak sesuai dengan SAK-ETAP .
4	Jika terdapat perubahan estimasi akuntansi yang mempengaruhi periode berjalan maka perlu diungkapkan perubahan tersebut.	BUMDes Bintang baru tidak ada pengungkapan informasi yang mengenai penyajian laporan keuangan yang disusun. Sehingga dari dasar tersebut, maka pada poin ini BUMDes tidak sesuai dengan SAK-ETAP .
5	Jika terdapat perubahan kesalahan periode lalu yang mempengaruhi periode berjalan maka perlu diungkapkan perubahan tersebut.	BUMDes Bintang baru tidak ada pengungkapan informasi yang mengenai penyajian laporan keuangan yang disusun. Sehingga dari dasar tersebut, maka pada poin ini BUMDes tidak sesuai dengan SAK-ETAP .

Dalam penerapan SAK-ETAP pada BUMDes Bintang Baru melalui aspek pengungkapan menunjukkan bahwa BUMDes tersebut **tidak menerapkan SAK-ETAP** dalam penyajian laporan keuangannya. Pernyataan tersebut didasari dari seluruh kriteria dari aspek pengungkapan yang tidak memenuhi dari kriteria SAK-ETAP. Hal tersebut terjadi karena BUMDes Bintang Baru tidak menyusun catatan atas laporan keuangan yang seharusnya menjadi bagian dari pengungkapan pada laporan keuangan. Hasil penerapan SAK-ETAP dari aspek pengungkapan mempunyai hasil yang tidak jauh berbeda dengan penelitian Saputra et al. (2019) dan Poeh et al. (2022) yang menunjukkan bahwa BUMDes belum sempurna dalam mengungkapkan informasi dari laporan keuangannya.

4.4 Komponen Laporan Keuangan

Penerapan SAK-ETAP pada aspek komponen laporan keuangan dijelaskan melalui tabel berikut.

Tabel 17. Penerapan SAK-ETAP pada Aspek Komponen Laporan Keuangan

No.	Kriteria	Kesimpulan dari kondisi BUMDes
1	Menyusun Laporan Posisi Keuangan/Neraca	BUMDes Bintang menyusun Laporan Posisi Keuangan/Neraca. Sehingga dari dasar tersebut, maka pada poin ini BUMDes sesuai dengan SAK-ETAP .
2	Menyusun Laporan Laba Rugi	BUMDes Bintang menyusun Laporan Laba Rugi. Sehingga dari dasar tersebut, maka pada poin ini BUMDes sesuai dengan SAK-ETAP .
3	Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas	BUMDes Bintang tidak menyusun Laporan Perubahan Ekuitas. Sehingga dari dasar tersebut, maka pada poin ini BUMDes tidak sesuai dengan SAK-ETAP .
4	Menyusun Laporan Arus Kas	BUMDes Bintang menyusun Laporan Arus Kas. Sehingga dari dasar tersebut, maka pada poin ini BUMDes sesuai dengan SAK-ETAP .
5	Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan	BUMDes Bintang tidak menyusun Catatan atas Laporan Keuangan. Sehingga dari dasar tersebut, maka pada poin ini BUMDes tidak sesuai dengan SAK-ETAP .

Dalam penerapan SAK-ETAP pada BUMDes Bintang Baru melalui aspek komponen laporan keuangan menunjukkan bahwa BUMDes tersebut **tidak menerapkan SAK-ETAP** dalam penyajian laporan keuangannya. Pernyataan tersebut didasari dari kriteria nomor 3 dan 5 dari aspek komponen laporan keuangan yang tidak memenuhi dari kriteria SAK-ETAP. Hal tersebut terjadi karena BUMDes Bintang Baru tidak menyusun laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang seharusnya menjadi dalam komponen laporan keuangan. Hasil penerapan SAK-ETAP dari aspek komponen laporan keuangan mempunyai hasil yang sama dengan penelitian Rudini et al. (2016), Wahyuningtias et al. (2021), dan Afkarina et al. (2022) yang menunjukkan bahwa BUMDes tidak lengkap dalam menyusun komponen laporan keuangannya.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian penerapan SAK-ETAP dalam penyusunan laporan keuangan pada BUMDes Bintang Baru dapat disimpulkan bahwa

- a. Penyusunan laporan keuangan yang dilaksanakan oleh pengurus BUMDes Bintang Baru masih tidak sesuai dengan SAK-ETAP.
- b. Belum adanya petunjuk pelaksanaan yang mengatur tentang penatausahaan keuangan di BUMDes

REFERENSI

- Adilah, H., & Rani, U. (2020). Kajian Teoritis Pelaporan Keuangan Pada Bumdes Ditinjau Dari SAK ETAP. *Gorontalo Accounting Journal*, 3(2), 116. <https://doi.org/10.32662/gaj.v3i2.1029>
- Afkarina, F. N., Probowulan, D., & Maharani, A. (2022). Penerapan Sak Etap Pada Bumdes Arum Jaya Mandiri Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember. *ULIL*

- ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(5), 1075–1081. Diambil dari <http://ulilalbabinstitute.com/index.php/JIM/article/view/190/196>
- Jati, B. P. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Wahana*, 22(1), 1–14. <https://doi.org/10.35591/wahana.v22i1.145>
- Lintong, J. S., Limpeleh, E. A. N., & Sungkowo, B. (2020). Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada BUMDes “Kineauan” Desa Wawona Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 16(1), 95–101. <https://doi.org/10.31940/jbk.v16i1.1597>
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (2021).
- Poeh, M. M., Dioh, S. S., & Peilouw, C. T. (2022). Implementation Analysis of Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (Sak Etap) on Financial Statements of Bumdes Ora Et Labora in Usapisonbai Village, Nekamese District. In *Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology on Social Science 2021 (iCAST-SS 2021) (Vol. 647, hal. 332–337)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220301.054>
- Pramitari, I., Nurhayanti, K., & Suningsih, S. L. P. Y. (2020). Penerapan Sak Etap Pada Unit Jasa Pengelolaan Sampah Bumdes Desa Buduk. *Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV)*, 6(2), 246–253. Diambil dari <https://proceeding.isas.or.id/index.php/sentrinov/article/view/463>
- Riyadhi, B., Prasetyo, H., & Fiorintari, F. (2021). Analysis of the implementation of Indonesia Financial Accounting Standards number 109 at the National Management Agency of West Kalimantan Province. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 3(1), 91–112. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2021.3.1.7422>
- Rozalia, S., Anitasari, M., & Ferina, Z. I. (2021). Analisis Penerapan SAK ETAP Pada BUMDes Luhur Sepakat Desa Sido Luhur Kabupaten Bengkulu Utara. *Disclosure: Journal of Accounting and Finance*, 1(1), 19–28. <https://doi.org/http://doi.org/10.29240/disclosure.v1i1.2860>
- Rudini, Nurhayati, & Afriyanto. (2016). Analisis Penerapan Sak Etap Pada Badan USAha Milik Desa (Bumdes) Langkitin Di Desa Langkitin. *Jurnal Mahasiswa Prodi Akuntansi UPP*, 2(1), 1–6. Diambil dari <https://www.neliti.com/publications/109374/analisis-penerapan-sak-etap-pada-badan-usaha-milik-desa-bumdes-langkitin-di-desa>
- Saputra, D. (2022). Analysis of Accounting Implementation of Village Owned Business Entities (Bumdes) Kuantan Singingi Regency. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 478–486.
- Saputra, R. A., Pribadi, C., Fadillah, H., Studi, P., Fakultas, A., & Universitas, E. (2019).

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) CIBODAS DESA CIBODAS KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN SUKABUMI. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi, 8(3). Diambil dari <https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/1665>

Sejarah Perkembangan. (2022). Diambil 21 April 2022, dari [https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/Sejarah Perkembangan](https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/Sejarah%20Perkembangan)

Seriwati, D., & Hendi. (2018). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Penerapan Standar Akuntansi Psak No. 10 Terhadap Kualitas Laba Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Global Financial Accounting Journal*, 2(1).

Tentang SAK ETAP. (2011). Diambil 21 April 2022, dari [https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/Tentang SAK ETAP](https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/Tentang%20SAK%20ETAP)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (2016).

Wahyuningtias, A., Yuliarti, N. C., & Martiana, N. (2021). Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Etap Pada Bumdes Rejo Makmur Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi. *Baswara: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 52–61. Diambil dari <http://jurnalbaswara.com/index.php/baswara/article/view/7>

Yuliana, Marzuki, & Ratna, A. F. (2018). Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Dalam Menyusun Laporan Laba Rugi Pada Bpr Ingin Jaya. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(2), 141–146.